

MANUAL INDIKATOR KINERJA

Pangkalan PSDKP BITUNG




2024

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. Manual Indikator Kinerja memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Manual Indikator Kinerja ini selanjutnya menjadi panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat berpedoman pada dokumen ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Manual Indikator Kinerja ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Bitung, 23 Januari 2024



Kurniawan, S.T., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.....	5
Data Anggaran Tahun 2024.....	8
INDIKATOR KINERJA 1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	9
INDIKATOR KINERJA 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	11
INDIKATOR KINERJA 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas.....	14
INDIKATOR KINERJA 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas .	17
INDIKATOR KINERJA 5 Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan.....	21
INDIKATOR KINERJA 6 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	23
INDIKATOR KINERJA 7 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan	26
INDIKATOR KINERJA 8 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	27
INDIKATOR KINERJA 9 Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	29
INDIKATOR KINERJA 10 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	31
INDIKATOR KINERJA 11 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	34
INDIKATOR KINERJA 12 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	36
INDIKATOR KINERJA 13 Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	38
INDIKATOR KINERJA 14 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	40

INDIKATOR KINERJA 15 Nilai pengawasan kearsiapan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	42
INDIKATOR KINERJA 16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	44
INDIKATOR KINERJA 17 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	48
INDIKATOR KINERJA 18 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	49
INDIKATOR KINERJA 19 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	50
INDIKATOR KINERJA 20 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung.....	51
INDIKATOR KINERJA 21 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	52
INDIKATOR KINERJA 22 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	54
INDIKATOR KINERJA 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	56
INDIKATOR KINERJA 24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	57
INDIKATOR KINERJA 25 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	58
INDIKATOR KINERJA 26 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	60

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN			
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		03 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		04 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		06 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK.4	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	07 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	08 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK.6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	09 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
SK.7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	10 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		11 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	12	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP				
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	75
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		15	Nilai pengawasan kearsiapan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	70
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	82
		17	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	84
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	21
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		21	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	94
		23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		25 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	93,76
		26 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	82

Data Anggaran Tahun 2024

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	26,611,564,000
SK1.1	<i>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2,909,415,000
SK2.1	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</i>	
SK2.2	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1,831,000,000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1,162,000,000
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</i>	
SK4.2	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23.369.311.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		55.883.290.000

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
----------------------------	---	--

2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.• Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provisi• Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan
--------------------	---	---

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$x = \frac{(a + b + c)}{100}$
-------------------------------	---	-------------------------------

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS
a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)
b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

5. SATUAN	: Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	: Laporan Supervisi Pembinaan Pokmaswas
8. POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

-
1. **SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
-
2. **INDIKATOR KINERJA** : **Indeks kinerja operasi kapal pengawas**
-
3. **DEFINISI** :
- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
 2. Cakupan wilayah pengawasan;
 3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
 - IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas yang dioperasikan oleh UPT PSDKP). Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.

4. **FORMULA PERHITUNGAN** :

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- i_{kp} : Indeks kinerja Kapal Pengawas
 $\text{Bobot } (\%)$: Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
 Capaian : Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
 Target : Sasaran kinerja Kapal Pengawas
-

Keterangan Pola Perhitungan:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan (Bobot 40%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari dan 1 (satu) objek kelautan per periode operasi

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 60%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
 - Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.
-

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

5. SATUAN	:	Indeks		
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas		
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimaze	<input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

-
1. **SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
-
2. **INDIKATOR KINERJA** : **Indeks kinerja operasi speedboat pengawas**
-
3. **DEFINISI** :
- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
 - Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 5. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
 6. Cakupan wilayah pengawasan;
 7. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 8. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
 - Pengukuran dilakukan secara mandiri oleh UPT PSDKP. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- i_{sp} : Indeks kinerja Speedboat Pengawas
 $\text{Bobot } (\%)$: Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
 Capaian : Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
 Target : Sasaran kinerja Speedboat Pengawas
-

Keterangan Pola Perhitungan:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan (Bobot 40%) yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan atau 1 (satu) objek kelautan per hari

2. Presentase Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM² (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.

3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%) yang terdiri dari:

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi speedboat pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Jumlah dukungan operasi lainnya (Bobot 5%) yang terdiri dari:

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 60%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 40%
-

- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasional Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

5. SATUAN	: Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN : TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas**

3. DEFINISI :

1. Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil.
2. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan.
3. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.
4. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas.
5. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.
6. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan
7. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan
8. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan
9. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan
10. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan
11. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan

PENJELASAN PENCAPAIAN IKU

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan **Berita Acara Akhir Bulan** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan:
 - Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
 - Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan
-

menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan Dokumen Pembelian Minyak Pelumas (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Air Bersih. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.
7. Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan

Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Pemenuhan logistik

khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.

4. FORMULA PERHITUNGAN : $X_p = x_a + x_b + x_c + x_d + x_e + x_f$

Keterangan:

- X_p : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30%)
- x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20%)
- x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25%)
- x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15%)
- x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5%)
- x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot: 5%)

* Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru

* Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas

Keterangan Pola Perhitungan:

- TW I : Nilai TW I
- TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2
- TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3
- TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

5. SATUAN : %

6. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome

7. SUMBER DATA : a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas).
b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.
c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.
d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.
e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.
f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.

8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimaze	<input type="checkbox"/> Stabilize	
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ol style="list-style-type: none">Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 4 (empat) unit.Pengadaan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan UPT Ditjen PSDKP.Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP.Penyelesaian pengadaan <i>speedboat</i> pengawas dan prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2023.Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan;Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa.Prestasi kerja Penyedia Jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (<i>backhoe, excavator, pile driver, concrete mixer truck</i>), material konstruksi dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia),Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional.Apabila dalam pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP dan pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$P_{sp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2}{b} \right)$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{sp} : Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p>$\sum a_1 + a_2$: Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)</p> <p>b : Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p>
-------------------------------	---	---

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	:	Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
----------------------------	---

2. INDIKATOR KINERJA	: Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
-----------------------------	---

3. DEFINISI	: <ul style="list-style-type: none">● Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.● Sarana Pengawasan SDKP pada Pangkalan PSDKP Bitung meliputi: 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 16 (enam belas) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat)● Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i> 50%),b. perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i> 40 %)c. perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i> 10%).● Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal kegiatan perawatan kapal pengawas seperti docking, yang dikerjakan oleh pihak lain (pihak galangan kapal) selaku pemenang tender.● Mesin penggerak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP merupakan buatan luar negeri sehingga dalam proses perbaikan permesinan seringkali memerlukan suku cadang yang tak jarang dalam memperolehnya harus indent.● Selain itu, pada pelaksanaannya proses naik docking dapat terjadi tidak sesuai jadwal karena adanya antrian yang disebabkan oleh molornya waktu pekerjaan kapal lain yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas secara tepat waktu.
--------------------	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	: $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$ <p>Keterangan:</p> <p>X_p : Persentase Perawatan Sarana</p> <p>x_a : perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>)</p> <p>x_b : perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i>)</p> <p>x_c : perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i>)</p>
-------------------------------	--

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM : **PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP**
NAMA KAPAL : **KAPAL PENGAWAS**
BULAN : **..... 2023**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)

5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

5. SATUAN : %

6. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome

7. SUMBER DATA : Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT

8. POLA PERHITUNGAN : () Akumulasi () Rata-rata (✓) Nilai Posisi Akhir

9. METODE CASCADING : () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (✓) Buat Baru

10. POLARISASI : (✓) Maximize () Minimaze () Stabilize

11. PERIODE PELAPORAN : () Bulanan () Triwulan () Semesteran (✓) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan dan Kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
3. DEFINISI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; 2. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi; 3. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{intel} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>X_{intel} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan</p> <p>a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan</p> <p>b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan</p>
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output Kendali Tinggi (<input type="checkbox"/>) Output Kendali Rendah (<input type="checkbox"/>) Outcome
7. SUMBER DATA	:	Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejukan; Hasil Pulbaket; Laporan masyarakat
8. POLA PERHITUNGAN	:	(<input type="checkbox"/>) Akumulasi (<input type="checkbox"/>) Rata-rata (<input checked="" type="checkbox"/>) Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	(<input type="checkbox"/>) Lingkup Dipersempit (<input type="checkbox"/>) Komponen Pembentuk (<input checked="" type="checkbox"/>) Buat Baru
10. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize (<input type="checkbox"/>) Minimaze (<input type="checkbox"/>) Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	(<input type="checkbox"/>) Bulanan (<input type="checkbox"/>) Triwulan (<input type="checkbox"/>) Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.2. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$
-------------------------------	---	--

Keterangan:

X_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Keterangan Pola Perhitungan:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi: a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

5. SATUAN	: %
6. TINGKAT VALIDITAS	: () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS)
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi (✓) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (✓) Buat Baru
10. POLARISASI	: (✓) Maximize () Minimaze () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan (✓) Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
3. DEFINISI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.3. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	

$$X_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- X_{sdp} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 Xi : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
 n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Keterangan Pola Perhitungan:

- TW I : Nilai TW I
TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2
TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3
TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4
-

Contoh:

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi: a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

5. SATUAN	: %
6. TINGKAT VALIDITAS	: () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS)
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata (✓) Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (✓) Buat Baru
10. POLARISASI	: (✓) Maximize () Minimaze () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan (✓) Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
----------------------------	---	--

2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1) atau Paksaan Pemerintah;e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$x = \frac{a}{b} \times 100\%$
-------------------------------	---	--------------------------------

Keterangan:

<i>x</i>	:	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
<i>a</i>	:	Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
<i>b</i>	:	Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan Kriteria Indeks:

Persentase	Nilai Indeks Maks	Kriteria Indeks
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

No	Tahap Penyelesaian	Persentase Perkembangan Kemajuan (%)	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
Jumlah		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

5. SATUAN : Indeks

6. TINGKAT VALIDITAS : () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome

7. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP			
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimaze	<input type="checkbox"/> Stabilize	
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$

Keterangan:

- X_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP
- x_n : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa
- n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Dengan Kriteria Indeks:

Persentase	Nilai Indeks Maks	Kriteria Indeks
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

5. SATUAN	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	:	Laporan Supervisi Pembinaan Pokmaswas
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DEFINISI	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	

$$x_a = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

Keterangan:

- x_a : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) (SP-3)
- $\sum b$: Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan
- Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan namun tidak ada capaian kasus atau kasus masih berproses di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
 - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di claim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
 - Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada triwulan berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada triwulan berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada triwulan berikutnya.
 - Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.
-

5. SATUAN	: Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	: () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata (✓) Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit (✓) Komponen Pembentuk () Buat Baru
10. POLARISASI	: (✓) Maximize () Minimaze () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan (✓) Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	: Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. FORMULA PERHITUNGAN	: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP.
5. SATUAN	: Niali
6. TINGKAT VALIDITAS	: (✓) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata (✓) Nilai Posisi Akhir

9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimaze	<input type="checkbox"/> Stabilize	
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.• Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.• Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.• Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
--------------------	---	---

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><i>X</i> : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p> <p><i>a</i> : Identifikasi Manajemen Risiko yang dipenuhi</p> <p><i>b</i> : Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko (form pemantauan Manajemen Risiko)</p>
-------------------------------	---	---

Keterangan Pola Perhitungan:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
8. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
-----------------------------	---	---

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.• Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.
--------------------	---	---

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:
-------------------------------	---	---

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

5. SATUAN	:	Nilai
------------------	---	-------

6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
-----------------------------	---	-----------------------

7. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. **SASARAN KEGIATAN** : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. **INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung**

3. **DEFINISI** :
- Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.
 - Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
 - a. Kualifikasi yaitu tingkat pendidikan ASN sesuai persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki dengan bobot penilaian sebagai berikut:

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2		25	20	15	10	5	1	

- b. Kompetensi (Bobot 40%) yaitu keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Struktural), Diklat Fungsional, Diklat 20 JP tahun berjalan, dan/atau Seminar, dengan penilaian sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialiasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.

- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
- c. Kinerja yaitu hasil penilaian predikat kinerja kerja ASN dengan bobot penilaian sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- d. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian riwayat hukuman disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak.

4. FORMULA PERHITUNGAN

- ASN Struktural:
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklatpim+Diklat20JP+Seminar)} / 3) + (\text{Nilai SKP}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Fungsional:
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklat fungsional+Diklat20JP+ Seminar)} / 3) + (\text{Nilai SKP}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Staf:
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklat20JP+ Seminar)} / 3) + (\text{Nilai SKP}) + (\text{Nilai Disiplin})$

5. SATUAN	:	Indeks		
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	:	Aplikasi MyASN BKN		
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimaze	<input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	: SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
4. FORMULA PERHITUNGAN	: Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
5. SATUAN	: Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	: Hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
3. DEFINISI	: Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
4. FORMULA PERHITUNGAN	: $\sum N$: Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
	Keterangan Pola Perhitungan: TW I : Nilai TW I TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2 TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3 TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4
5. SATUAN	: %
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	: <ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
8. POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker • Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satker 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja 3. Lima Menit Sebelum Jadwal 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin 5. Upayakan Data Terkini 6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan 7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah 9. ASN PSDKP Produktif Kerja 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif 12. Gelorakan Gerakan hemat Energi
4. FORMULA PERHITUNGAN	: Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
5. SATUAN	: Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	: LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
8. POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	: <ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSPDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none">1. Masalah, tema dan sasaran2. Proses Analisa3. Solusi4. Mutu Proses Pelaksanaan5. Tingkat Kesulitan6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi7. Dampak Perbaikan Hasil8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
4. FORMULA PERHITUNGAN	: Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
5. SATUAN	: Inovasi
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	: Inovasi UPT Pengawasan SDKP
8. POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimaze <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017.• Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Bitung adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung.• Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI).
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021.• Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:<ul style="list-style-type: none">U1-Persyaratan LayananU2-Kemudahan ProsedurU3-Waktu PenyelesaianU4-Kesesuaian BiayaU5-Kesesuaian ProdukU6-Kecepatan Respon/Kompetensi PetugasU7-Kemudahan Fitur/Perilaku PetugasU8-Layanan KonsultasiU9-Kualitas Isi/Sarana <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p> <table><tr><td>>88,31</td><td>:</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61-88,30</td><td>:</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00-76,60</td><td>:</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00-64,99</td><td>:</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	>88,31	:	Sangat Baik	76,61-88,30	:	Baik	65,00-76,60	:	Kurang Baik	25,00-64,99	:	Tidak Baik
>88,31	:	Sangat Baik												
76,61-88,30	:	Baik												
65,00-76,60	:	Kurang Baik												
25,00-64,99	:	Tidak Baik												

Keterangan Pola Perhitungan:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

5. SATUAN	: Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	: () Output Kendali Tinggi (✓) Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata (✓) Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (✓) Buat Baru
10. POLARISASI	: (✓) Maximize () Minimaze () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan (✓) Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
-----------------------------	---	--

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.• Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;- Keikutsertaan: Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi portal kkp <i>collaboration office</i>;- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Ketua Tim Kerja Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;2. Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;3. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none">a) Menggunakan portal kkp <i>collaboration office</i>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ol style="list-style-type: none">1. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun2. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan3. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
-------------------------------	---	---

- e) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.
- f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu **kali dalam triwulan**.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan** setiap triwulan.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**.

Keterangan POLA PERHITUNGAN:

- TW I : Nilai TW I
- TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2
- TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3
- TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

5. SATUAN	: %
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Portal <i>Collaboration Office</i> KKP
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2021-2023; 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
3. DEFINISI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
----------------------------	---	---

2. INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
-----------------------------	---	---

3. DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)<ol style="list-style-type: none">1. Revisi DIPA (10%)2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)<ol style="list-style-type: none">3. Penyerapan Anggaran (20%)4. Belanja Kontraktual (10%)5. Penyelesaian tagihan (10%)6. Pengelolaan UP dan TPU (10%)7. Dispensasi SPM (5%)c. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)<ol style="list-style-type: none">8. Capaian output (25%)• Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain<ol style="list-style-type: none">1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95;3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
--------------------	---	--

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) / \text{Konversi bobot}$
-------------------------------	---	---

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu
-

5. SATUAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
8. POLA PERHITUNGAN	:	() Akumulasi () Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 26

-
1. **SASARAN KEGIATAN** : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
-
2. **INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung**
-
3. **DEFINISI** :
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.
 - Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait.
 - Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
 - Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capain IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA
 - Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50
-
4. **FORMULA PERHITUNGAN** : *Formula Aspek Implementasi*

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
P : penyerapan anggaran
K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
-

COP : capaian output program
 CRO : capaian ro
 NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
 W_P : bobot penyerapan anggaran
 W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
 W_{COP} : bobot capaian Output Program
 W_{CRO} : bobot capaian RO
 W_E : bobot efisiensi

5. SATUAN	: Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. SUMBER DATA	: Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
8. POLA PERHITUNGAN	: () Akumulasi () Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	: () Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	: () Bulanan () Triwulan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan